

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelarm Ahli
Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

DISUSUN OLEH

SUSI

NIM. 01074203620



**JURUSAN DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/ 2013 M**

ABSTRAK

Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Restoran

Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir

OLEH

SUSI

NIM: 01074203620

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem apa yang digunakan untuk menerapkan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, hal yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak restoran adalah mengetahui sistem apa yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran pada Dispenda sehingga dengan mengetahui sistem yang diterapkan akan memudahkan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan data skundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan.

Undang-undang perpajakan kita yang menganut self assesment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah penghasilan yang terutang kemudian melaporkannya ke kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan setelah tahun pajak berakhir.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul, “ **PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada jurusan Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor, I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Andri Novius, SE, M. SI. AK selaku ketua jurusan Diploma III Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Ratna Dewi, S.SOS, M. SI selaku dosen pembimbing yang telah meluankan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesai Tugas Akhir ini.
5. Ibu Jasmina Syfe'i, SE, AK selaku sekretaris jurusan Diploma III Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Ibu Linda selaku ketua bagian umum dan kepegawaian serta pegawai-pegawai kantor Dispenda kabupaten Indragiri Hilir, yang telah

memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Yang paling utama kedua orang tuaku ayahanda Aidi dan Ibunda Saripah yang telah banyak memberikan doa, semangat, nasehat, bimbingan dan juga materi hingga penulis sampai pada saat ini.
9. Buat teman-teman kost “Bidan Dahlia” Kak susii, Kak linda, Kak juni, Nuri, Evi, Azura, Amy, Wulan, Mike.
10. Buat teman-teman yang selalu membantu dalam menyelesaikan Tugas akhir ini “Lilis, Arien, Ratih, Nery, Rita, Resy, Salman, sukri dan lela.
11. Buat kakak-kakak ku” kak marlena, kak misna, kak diana, dan adik-adik ku “Eka dan yuli.
12. Buat semua teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi angkatan 2013, serta adik-adik kelas, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan sukses, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, amin amin ya rabbal alamin

Pekanbaru, September 2013
Penulis

Susi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	 9
2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Indragiri Hilir	 9
2.2 Visi Dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	10
2.3 Uraian Tugas	11
2.4 Struktur Organisasi	14
 BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	 17
3.1 Tinjauan Teori	17
3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum	17
3.1.2 Fungsi Pajak	19
3.1.3 Jenis Pajak	20
3.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	21
3.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	21
3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	22
3.1.7 Pengelompokan Pajak	24
3.1.8 Asas Pemungutan Pajak.....	25
3.1.9 Syarat Pemungutan Pajak	25
3.1.10 Pengertian Pajak Daerah	27
3.1.11 Jenis Pajak Daerah.....	30
3.1.12 Pengertian Pajak Restoran	31
3.1.13 Dasar Hukum Pajak Restoran	32
3.1.14 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	32
3.1.15 Pengertian Pajak Menurut Pandangan Islam	33
3.1.16 Karakteristik Pajak Menurut Syariah	37

3.2 Tinjauan Praktek	38
3.2.1 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran	38
3.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Restoran	39
3.2.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran.....	45
3.2.4 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	46
3.2.5 Ketentuan Pidana Pajak Restoran	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Herry purwono (2010: 10) pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, ditetapkan sembilan (9) jenis pajak daerah, yaitu tiga (3) jenis pajak daerah tingkat I pajak provinsi dan enam (6) jenis pajak daerah tingkat II pajak kabupaten/Kota.

1. Pajak daerah tingkat I terdiri dari:

- a Pajak Kendaraan Bermotor
- b Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
- c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak daerah tingkat II terdiri dari:

- a Pajak Hotel
- b Pajak Restoran
- c Pajak Reklame
- d Pajak Penerangan Jalan

- e Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
- f Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”. Undang- undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya dibawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan telah dibuat banyak undang-undang yang mengatur masalah perpajakan Indonesia. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Berbeda dengan Undang-undang perpajakan lainnya, undang-undang nomor 6 tahun 1983 (06/83) hanya berisikan hukum pajak formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara.

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 diundangkan pada tanggal 9 Nopember 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566.

Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000. Lembaran negara Republik indonesia nomor 3984.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan dengan peraturan daerah, begitu juga dengan pemungutan pajak restoran. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak restoran sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) No 24 Tahun 2010. Tarif pemungutan pajak restoran ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi tidak boleh dari 10%.

Namun pada Dinas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan tarif pemungutan pajak restoran sebesar 10% dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana yang tercantum dalam PERDA (peraturan Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang pajak restoran pada Bab 1 Pasal 10 menjelaskan bahwa”pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang yang disediakan oleh restoran”. Penyelenggaraan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan

usaha restoran tertentu dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pada bab 2 pasal 2 menjelaskan dengan peraturan daerah ini, dipungut pajak restoran terhadap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 : jumlah Wajib Pajak Restoran

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2010	67
2	2011	67
3	2012	74
4	2013	74

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pajak restoran yang masuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari restoran. Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir No 24 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak restoran.

Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak restoran ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2013

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2010	17.865.000,00	28.595.000,00	160,06
2	2011	22.720.000,00	37.844.250,00	166,56
3	2012	11.665.000,00	56.482.751,00	484,20
4	2013	25.835.000,00	45.779.556,00	177,19

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak Restoran pada tahun 2010 penerimaanya sangat bagus yang mana mencapai 160,06 %, dan pada tahun 2011 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 166,56 %, dan pada tahun 2012-2013 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan terus setiap tahunnya hingga mencapai 177,19 %, hal ini kemungkinan terjadi akibat sistem pemungutan terhadap pajak restoran yang belum diketahui oleh pemilik restoran tersebut.

Berdasarkan keadaan data tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul:“ **PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”. Dalam laporan Tugas Akhir penulis.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu: “Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan masukan kepada dinas Pendapatan Daerah khususnya mengenai penerapan sistem pemungutan pajak restoran
2. Sebagai referensi penulis berikutnya

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Hang Tuah No.04 Tembilahan.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli dan akan direncanakan selesai pada bulan September 2013.

1.4.2 Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Data Skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data skunder umumnya bisa berupa Dokumen, Arsip, Perumusan dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti
2. Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan tentang bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4.4 Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.4.5 Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang tinjauan penerapan sistem pemungutan pajak restoran

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan penerapan sistem pemungutan pajak restoran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) di dirikan pada tahun 1965, akan tetapi pada masa itu Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian keuangan dan Dinas Khas Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Tingkat II Indragiri Hilir. Dengan kemajuan perkembangan dan Tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang diperkirakan pada tahun 1977 namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati yang terletak di jalan gajah mada nomor 01 Tembilahan Kota.

Dengan memiliki kantor tersendiri otomatis terpisah pula tenaga kerja pelaksanaan dan pimpinan Kantor, dan pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mulai berdiri sendiri dibawah Pimpinan Bapak H.Usman Fu'ad.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan juli 2005 Dinas Pendapatan Daerah berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di gedung Inhil Business Center yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Center tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah. Di gedung Inhil Business Center Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Bank Perkriditan Rakyat, Kantor Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD).

Gedung Inhil Business Center tersebut diresmikan pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun nama – nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. H. Usman Fu'ad
2. Yhuda Yahya BA
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jailani Sabrah
5. Drs. Nazarudin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Saripuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, SE. MP
10. Drs. H .A. Rasyid HZ
11. Fajar Husin, SH. MH (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sekarang)

2.2 Visi dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang optimal. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Meningkatkan kinerja aparatur dinas pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan pendapatan daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

2.3 Uraian Tugas

Adapun aktifitas Dinas Pendapatan Daerah yang disusun dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 62/DPD-TU/IV/2005 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Memimpin kegiatan Dinas, baik Administratif maupun Operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tugas.
2. Bidang Sekretariat
 - a. Penyusun program dan kegiatan kesekretariatan
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian
 - f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Bidang Dana Perimbangan
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bumi dan Bangunan
 - b. Penyelenggaraan serta Pajak program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan Lingkup Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan Lingkup Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Lingkup Pembukuan dan Pelaporan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan lingkup pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan lingkup pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pendataan, Penetapan dan Keberatan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

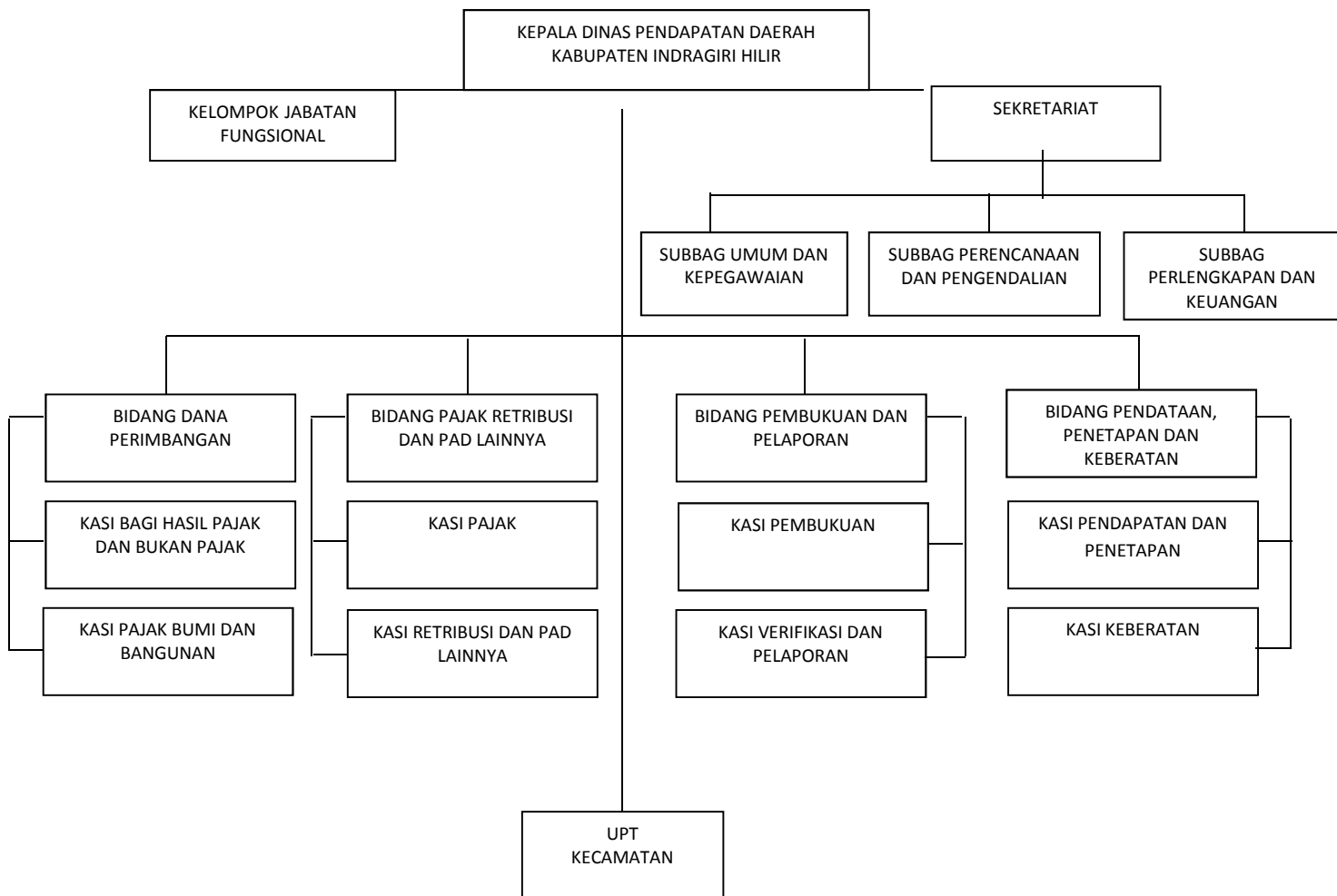
2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
 - c Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan
3. Bidang Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

- b Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
- 4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - a Seksi Pajak
 - b Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksis Pembukuan
 - b. Seksi Verifikasi dan Pelaporan
- 6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - b. Seksi Keberatan

Gambar II.1
Srtuktur Organisasi



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

BAB III

TINJUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pajak sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut mariohot P. Siahaan (2005 :7) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Menurut Sony Agustinus (2009 : 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak (tax payer) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Afrizal (2009 : 23) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Smeet (2008:6), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Sommertel Ray M (Adrian Sutedi 2011:2), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

3.1.2 fungsi pajak

Pajak memiliki dua fungsi, fungsi pajak tersebut adalah:

a Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b Fungsi meatur (regularend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

3.1.3 Jenis pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

3.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dipandang Tahun 2008 perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8)

3.1.5 Tata cara pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2009:6) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

3.1.6 sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, jenis tersebut adalah:

1. Official Assesment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b Wajib pajak bersifat pasif
- c Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 5) pajak dapat dibedakan beberapa kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
3. Menurut lembaga pemungutan
 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri dari:

Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak kabupaten/ kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

3.1.8 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:10) asas pemungutan pajak dibagi atas 3 diantaranya:

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatiksn tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Yurisdis)

Dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3.1.10 pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dalam Afrizal(2009:48). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Menurut Marihot (2005: 10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Menurut Sony devano (2006 : 45) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut siti (2010: 46) Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang Nomor. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 18 tahun 1997 dalam Afrizal(2009:48). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. *Daerah otonom*, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia
2. *Pajak daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
3. *Badan*, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. *Subjek pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah
5. *Wajib pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

3.1.11 jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi 2 kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

3.1.12 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, objek restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pajak restoran adalah jumlah pembayaran tamu kepada restoran. Tapi pajak restoran yang paling tinggi adalah 10% dari nilai pembayaran tersebut.

Menurut Marihot (2005 : 272-273) dalam pungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yaitu:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga, dan katering
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan dibidang restoran

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran

3.1.13 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas dasar Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak restoran
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada kabupaten/kota dimaksud

3.1.14 Dasar Pengenaan pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar saat pembelian makanan dan minuman.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima direstoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya rumah makan, kafe, kantin, kedai nasi, atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapan atau disantap tempat lain.

3.1.15 Pengertian Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama **العُشْرُ** (Al-Ushr) atau **الْمَكْسُ** (Al-Maks), atau bisa juga disebut **لِضْرِيَّة** (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Atau dengan arti lain “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” . Atau suatu ketika bisa disebut **الْخَرَجُ** (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Sedangkan menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”.

Hukum pajak dan pemungutnya menurut islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum tentang pajak dapat kita lihat dalam Al.Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian (Q.S An-Nisa Ayat 29).

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Kesimpulan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah bagaimana berbisnis dengan benar. Dan Perlu dipahami, bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kekayaan dengan rajinnya shalat seseorang. Apabila seseorang itu mau kaya, maka ia rajin bekerja. Dan Allah sudah menentukan ketentuannya atau sunnatullah yaitu barang siapa yang kerja dia akan dapat hasil. Adapun soal keberkahan, itu adalah dari Allah. Tapi secara dhahir kerja adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan kekayaan. Baik kafir atau mukmin kalau dia mau bekerja dengan benar, maka ia mendapatkan kekayaan.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqh az-zakah*, Gazi inayah dalam kitabnya *Al-iqtishad wa ad-dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal Fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Gusfahmi lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena adanya definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Objeknya adalah harta (al-mal)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non muslim
4. Tujuan untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (Al-qur'an dan hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntan kemaslahatan umum.

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan

hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

3.1.16 Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-islam), yaitu:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika baitu mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pajak restoran. Dibawah ini dapat dilihat tabel tentang Target dan Realisasi Pemungutan Pajak restoran Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran
Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2010-2013

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2010	17.865.000,00	28.595.000,00	160,06
2	2011	22.720.000,00	37.844.250,00	166,56
3	2012	11.665.000,00	56.482.751,00	484,20
4	2013	25.835.000,00	45.779.556,00	177,19

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak Restoran pada tahun 2010 penerimaanya sangat bagus yang mana mencapai 160,06 %, dan pada tahun 2011 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 166,56 %, dan pada tahun 2012-2013 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan terus setiap tahunnya hingga mencapai 177,19 %, hal ini kemungkinan terjadi akibat sistem pemungutan terhadap pajak restoran yang belum diketahui oleh pemilik restoran tersebut.

3.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kecamatan Tembilahan dilakukan setiap bulannya. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran ini adalah Self Assessment.

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk wajib pajak yang sudah dimiliki NPWP terdiri dari:

- a Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak yang diberi kuasa:
 - 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD diberi tanda dan tanggal penerimaan
 - 2. Apabila belum lengkap SPTPD dikembalikan kepada wajib pajak untuk melengkapi
- b Mencatat data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi proses daftar ketetapan
- c Formulir dan daftar yang digunakan adalah formulir kartu yang terdiri dari:
 - 1. Daftar SPTPD
 - 2. Daftar SPTPD wajib pajak Self Assesment.

Self assesment dimana wajib pajak yang menghitung, menyetorkan ke kas daerah UPT di Dinas Pendapatan Kecamatan Tembilahan berdasarkan omset pendataan restoran masing-masing. Peraturan Daerah (PERDA) No 24 Tahun 2010. Akan tetapi dalam penelitian yang saya lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir saya menemukan justru petugaslah yang turun kelapangan (juru pungut dan bendahara pembantu penerima) untuk menagih jumlah pajak yang harus disetorkan oleh restoran tersebut berdasarkan omset x 10% (10% dari omset pendapatan). Yang akan nanti direkap seluruh jumlah penerimaan yang ada dan disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima di Dipenda.

Dalam sistem Self Assesment , wajib pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang menjadi kewajibannya. Setelah itu, wajib

pajak mengisi SPT dan kemudian menyetorkannya ke ke kas daerah. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran, kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a Kurang kejujurnya wajib pajak dalam melakukan pengisian SPTPD dalam sarana penyetoran pajak restoran
- b Sumber daya manusia relatif masih kurang
- c Kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir N0 24 Tahun 2010

Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah harus memperhatikan harus mengambil tindakan. Tindakan tersebut yang harus dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian blangko SPTPD
- b Meningkatkan sumber daya manusia khususnya pemungut pajak restoran
- c Meningkatkan sosialisasi khususnya peraturan daerah No 24 Tahun 2010

Self assesment memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memungut pajak restoran. Kelebihan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a Memberikan leluasa wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajaknya
- b Mengurangi beban kerja petugas pemungut
- c Pihak Dipenda hanya melakukan monitoring pengisian formulir

Dan kelemahan dalam pemungutan pajak restoran yang meggunakan sistem Self Assesment adalah sebagai berikut:

- a Kurangnya akurat data dikarenakan wajib pajak menghitung sendiri pajak yang mau disetorkan

- b Kurangnya maksimal penerimaan daerah
- c Mereka selalu memberi alasan agar pajak yang disampaikannya tidak terlalu besar
- d Kurangnya kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak

Syarat-syarat wajib pajak untuk membayar pajak adalah ada objek tempat usaha, jelas letak dan kedudukannya, mengisi blangko SPTPD dari petugas berdasarkan omset perbulan.

Dari keseluruhan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak semua restoran tersebut bisa dikenakan pajak. Selain restoran tersebut telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga telah memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Restoran tersebut harus berpendapatan paling kurang dalam waktu satu tahun restoran tersebut harus berpendapatan Rp 15.000.000,00 pertahun atau Rp 1.250.000,00 perbulannya.

Mekanisme Pemungutan Pajak restoran dari Self Assessment System diantaranya adalah :

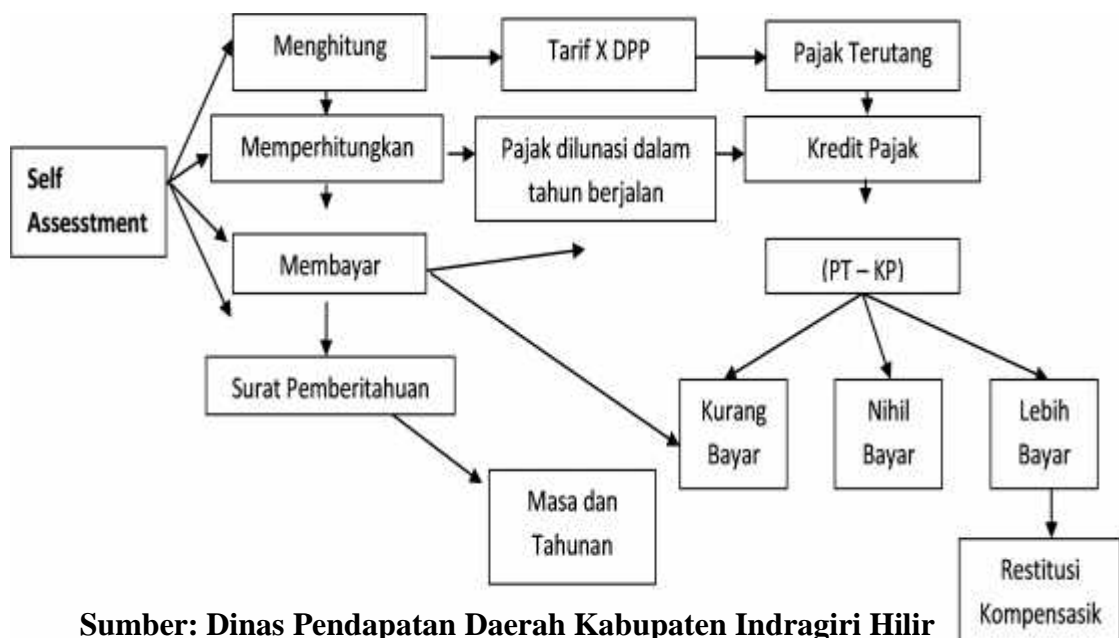
- a. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- b. Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang
- c. Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak. Sehingga apabila pajak terutang dikurang kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak maka bisa muncul pajak kurang bayar, apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut

disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/di kompensasikan

- d. Dalam hal membayar, pajak dapat dilunasi dalam tahun berjalan dan pajak bisa juga terjadinya kurang bayar.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat Diagram Alur mekanisme pemungutan restoran dibawah ini :

Gambar III.1
Diagram Alur Mekanisme Pemungutan Pajak restoran dengan menggunakan Self Assesstment Sistem



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan sistem pemungutan pajak diatas,pajak restoran di Kecamatan

Tembilahan menggunakan sistem Self Assessment System, dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri dan dalam sistem ini yang mana pemerintah hanya berperan untuk mengawasi seperti

misalnya: Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pajak Restoran di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dipungut dalam Wilayah Daerah. Sedangkan besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 dalam Pasal 9 yang berbunyi “ besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi” tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan. Dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi” dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Rumusnya:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Yang Dilakukan Kepada} \\ &\quad \text{Restoran}\end{aligned}$$

Contoh:

Seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran “SUGA CHIKEN” dan melakukan pembayaran atas:

Makan	:150.000,00
Minuman	: <u>30.000,00</u> +
Jumlah	: 180.000,00
Service charge	: <u>20.000,00</u> +

Jumlah pembayaran : 200.000,00

Jumlah yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak restoran, yaitu sebesar Rp200.000,00

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak restoran pada diatas dan apabila besarnya tarif pajak pada kota tempat restoran berlokasi ditetapkan sebesar 10%, dapat dihitung besarnya pajak restoran yang terutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 20.000,00$

3.3 Tata Cara pembayaran Pajak Restoran

Dalam pembayaran pajak restoran ini, wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya melewati: UPT, Dinas Pendapatan Daerah, dan Bank. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomo.24 Tahun 2010, dalam Pasal 13 yang mana tata cara pembayaran pajak restoran yaitu:

- a Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD
- b Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak yang harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati
- c Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan menggunakan SSPD
- d Tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

3.4 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran apabila:

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a Nama dan alamat wajib pajak
 - b Masa pajak
 - c Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d SKPDN
2. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, sudah memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampaui dan bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
4. Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan pajak (SPPKP).

6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan diterbitkannya SKPDLB, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

3.5 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Menurut pasal 34 peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 24 Tahun 2010 ketentuan pidana dapat dilakukan:

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga/katering.

Pemungutan Pajak Restoran dilakukan setiap bulannya setelah pembayaran kepada restoran. Sedangkan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran adalah sistem self Assesment dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.

4.2 Saran

Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti, sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Pegawai Kantor Dinas Pendapatan hendaknya mensosialisasi tentang Sistem pemungutan pajak

Restoran kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Sistem pemungutan pajak Restoran dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak restoran. Kemudian, Dinas Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyetoran pajak oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, *Materi Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Untuk Kalangan Sendiri, Pekanbaru, 2009

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI Yogyakarta, 2008

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI Yogyakarta, 2009

Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI Yogyakarta, 2011

Devano, sony, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana prenada media group, Jakarta, 2006

Purwono, Herry, *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakara, 2010

Muhammad Rusjdi, *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, PT. Indeks, Jakarta, 2007

Gusfahmi, *pajak menurut syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Hutagaol, John, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor.24 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

<http://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Smeets dalam Wirawan, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

